

## **Menjadikan PTAIN Sebagai Kekuatan Membangun Peradaban**

Jumlah PTAIN di tanah air ini sudah mencapai 52 buah. Yang berbentuk universitas ada 6 buah, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Malang dan UIN Syarif Qosim Pakanbaru, UIN Bandung dan UIN Alauddin Makassar. IAIN ada 12 buah sedangkan STAIN ada 34 buah. Semua PTAIN ini, sekalipun awal keberadaannya merupakan tuntutan dari bawah, artinya atas usul dari masing-masing daerah di mana PTAIN itu berada, akan tetapi setelah berstatus menjadi negeri, kehidupannya dibiayai oleh pemerintah pusat. Biaya itu meliputi pemenuhan kebutuhan untuk menggaji dosen dan karyawan, pengadaan sarana dan prasarana kampus maupun biaya operasional kegiatan sehari-hari seperti atk, biaya listrik, tilpun dan lain sebagainya.

Melihat jumlah yang sedemikian besar, PTAIN ini menggambarkan betapa seriusnya sesungguhnya pemerintah Indonesia memiliki perhatian dan kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tinggi Islam yang sedemikian besarnya ini. Padahal, di berbagai negara, hal-hal yang terkait dengan kepentingan agama, biasanya diserahkan kepada komunitas pemeluk masing-masing agama yang bersangkutan. Pemerintah di berbagai negara tidak dibebani membiayai kegiatan yang bernuansa keagamaan. Inilah sesungguhnya keunikan negeri Indonesia yang menyatakan diri sebagai bukan negara agama tetapi juga tidak membiarkan kehidupan keagamaannya.

Posisi PTAIN yang amat strategis dan terlihat istimewa itu, setelah menjadi bagian organisasi pemerintah, ternyata menjadi sama dengan sektor-sektor birokrasi lainnya. Lembaga pendidikan Tinggi Islam ini juga menjadi bersifat birokratis. Padahal agama yang seharusnya kaya dengan kekuatan inspiratif dan ideologis ternyata setelah menjadi bagian birokrasi, maka kekuatan itu seringkali hilang dan bahkan lumpuh. Ia juga tampak berjalan mekanis, prosedural dan formal. Kekuatan inspiratif, kreatif dan imajinatif yang bersumber dari nilai-nilai agama tidak jarang hilang begitu saja. Akibatnya, tidak berbeda dengan departemen lainnya, tatkala muncul isu-isu penyimpangan seperti koloni, nepotisme dan korupsi, maka di lembaga yang mengurus agama ini juga terjadi. Konflik-konflik internal yang seharusnya bisa diselesaikan dengan pendekatan agama, ternyata pada kenyataannya jauh panggang dari api. Nuansa keberagaman dalam penyelesaian berbagai persoalan internal departemen yang mengurus dan mengembangkan akhlakul karimah ini tidak terlalu terasa bedanya dari departemen lainnya.

Pertanyaannya adalah mengapa kenyataan itu terjadi ? Sekedar jawaban sementara, saya melihat bahwa tidak sedikit orang-orang internal departemen agama atau juga pengelola PTAIN dalam melakukan perannya lebih loyal pada aturan birokrasi daripada nilai-nilai agama yang mereka pegangi. Padahal semestinya, orang Departemen Agama dan juga PTAIN lebih kaya nuansa, inspirasi, kreasi dan imajinasi yang bersumber dari kitab suci yang seharusnya diposisikan sebagai ruh birokrasi di mana mereka bekerja. Aturan-aturan birokrasi semestinya diperkukuh dengan nilai-nilai yang bersumber dari agama yang mereka dipegangi.

Jika hal itu dilakukan, maka PTAIN khususnya dan birokrasi Departemen Agama akan menjadi kekuatan penggerak dan type ideal dari birokrasi negara secara keseluruhan. Sebaliknya jika kekuatan intrinsik agama terkalahkan oleh birokrasi, maka yang terjadi adalah justru memanipulasi nilai-nilai agama yang

sesungguhnya merupakan kerugian besar bagi agama yang seharusnya dikembangkan dan dijunjung tinggi. Allahu a'lam